

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Unit Percetakan
Al-Qur'an. Organisasi. Susunan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan ketersediaan Al-Qur'an yang terjaga kesucian dan kemurniannya perlu dibentuk Unit Percetakan Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Percetakan Al-Qur'an;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian/-Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2719.1/PAN-RB/9/2012, tanggal 26 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN.**

**BAB I
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Pasal 1

Membentuk Unit Percetakan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Lembaga Percetakan Al-Qur'an yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 2

Lembaga Percetakan Al-Qur'an mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan, pencetakan, dan pendistribusian Al-Qur'an, serta pemberian pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Percetakan Al-Qur'an menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penerbitan, pencetakan, dan pendistribusian Al-Qur'an;
- b. pelaksanaan penerbitan, pencetakan, pendistribusian Al-Qur'an, buku-buku agama, dan keagamaan Islam;
- c. pelayanan jasa pencetakan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Lembaga Percetakan Al-Qur'an; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Lembaga Percetakan Al-Qur'an bertanggung jawab kepada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sekretaris Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur'an terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan non Eselon yang berfungsi sebagai pimpinan dan penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Percetakan Al-Qur'an.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.a yang bertugas memberikan dukungan administratif, meliputi bidang perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membantu pelaksanaan tugas Lembaga Percetakan

Al-Qur'an dalam penyelenggaraan pencetakan, penerbitan, dan pendistribusian Al-Qur'an sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Lembaga Percetakan Al-Qur'an.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Lembaga Percetakan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

BAB II TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPQ maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar Lembaga Percetakan Al-Qur'an.

Pasal 10

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 12

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Pasal 13

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Lembaga Percetakan Al-Qur'an wajib melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

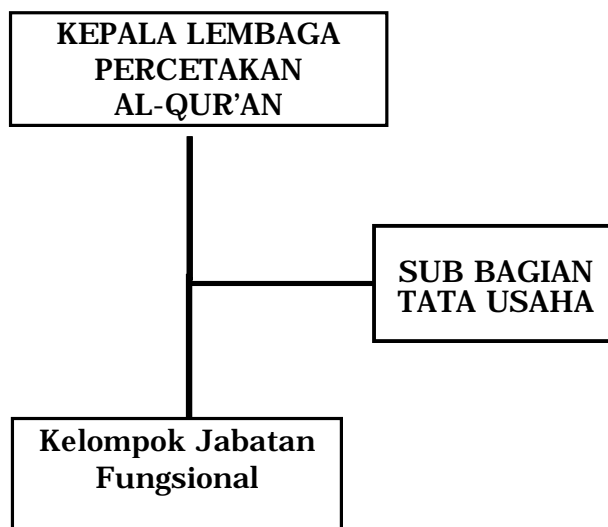
SURYADHARMA ALI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN**

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERCETAKAN AL-QUR'AN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI